

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki peran yang sangat besar bagi aktivitas perekonomian bagi setiap Negara, hal ini biasanya diperankan oleh lembaga keuangan yang berupa bank maupun non bank. Peran yang dilakukan oleh bank maupun non bank ini merupakan nafas segar untuk dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank dan non bank adalah perantara yang dilakukan untuk memenuhi prasarana pendukung sehingga menghasilkan pengaruh untuk suatu kelancaran perekonomian.¹

Perekonomian di Indonesia dapat dikatakan belum mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kedalam jenjang perekonomian yang lebih baik. Dapat dikatakan demikian karena banyaknya persaingan dan keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia, yang seringkali masyarakat memperlakukan hal tersebut seolah-olah tidak memiliki harapan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat pencari kerja terdaftar dan lowongan kerja terdaftar di Badan Pusat Statistik di provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2015 ditabel berikut:

¹Budisantoso, Totok & Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014, Hal. 10

Tabel 1.1 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Dan Lowongan Kerja Terdaftar Tahun 2011-2015

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar			Lowongan Kerja Terdaftar		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
2011	1.789	2.151	3.940	1.482	1.382	2.864
2012	4.109	3.609	7.718	1.547	2.945	4.492
2013	6.223	6.263	12.459	4.902	5.460	10.362
2014	7.688	7.638	15.326	7.896	5.811	13.797
2015	8.026	8.685	16.711	7.111	6.980	14.091

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa lowongan pekerjaan yang berada di provinsi DI Yogyakarta hingga tahun 2015 berjumlah 14.091 yang terdaftar dalam Badan Pusat Statistik sedangkan jumlah pencari kerja hingga tahun 2015 mencapai 16.711, dari tahun ketahun jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan adanya lowongan kerja yang terdaftar dalam Badan Pusat Statistik.

Dari banyaknya pencari kerja dari tahun ketahun yang semakin meningkat dan jumlah lowongan pekerjaan yang juga demikian pula. Namun pada kenyataannya

jumlah pencari kerja selalu melebihi dari kapasitas lowongan pekerjaan. Hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian tidak stabil dengan meningkatnya jumlah pengangguran tiap tahunnya.

Untuk mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang semakin meningkat pada tiap tahunnya ini maka solusi bagi pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah) untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Hal ini terbukti bahwa UMKM mempunyai kemampuan untuk menggerakkan sektor riil yang berpengaruh langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah UMKM yang berada di wilayah kabupaten diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 230.000 unit.² Dengan bertambahnya jumlah UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada diwilayah DIY serta bertambahnya nilai aset pada tiap tahunnya.

Melihat perkembangan UMKM yang semakin lama semakin meningkat, secara tidak langsung pelaku usaha membutuhkan jasa lebih dalam perkembangan usahanya dari suatu lembaga keuangan. Hal tersebut menjadikan antar sesama lembaga keuangan berlomba-lomba untuk memberikan jasanya, terlebih bagi lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengenal lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah mempunyai aturan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yaitu peraturan serta perjanjian yang

²<http://www.harianjogja.com/baca/2016/11/17/umkm-jogja-permodalan-dari-bank-masih-jadi-andalan-utama-769400> diakses tanggal 14 maret 2017, pukul 15.15 WIB

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.³

Didalam lembaga keuangan syariah, secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu lembaga bank dan lembaga non bank seperti halnya dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syariah yang berupa non bank yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Wakaf.

Pada umumnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai perbedaan dan persamaan masing-masing. Perbedaannya bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mempunyai landasan hukum seperti halnya Bank Umum Syariah (BUS) yaitu berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian BPRS selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 dan surat edaran Bank Indonesia No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank

³M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. Surakarta: Pustaka Setia, 2012, Hal. 03

Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴ Dalam hal ini BPRS bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

Sejarah berkembangnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia berawal pada tahun 1991 yang diawali oleh BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera yang berada di Bandung. Kemudian pada tahun 1992, muncul UU tentang perbankan No. 7 Tahun 1992, yang isinya tentang bagi hasil. Hal ini bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian di Provinsi DI Yogyakarta, muncul 2 BPRS sekaligus, diantaranya BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia.⁵

Dengan berjalannya waktu kemudian muncul BPR Syariah lain dalam mengembangkan ekonomi islam yang mampu bersaing dengan BPR Konvensional. Sejalan dengan perkembangan hingga tahun 2016 telah berdiri 164 BPR Syariah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan diantaranya BPR Syariah tersebut yang berada di Indonesia 12 diantaranya berada di Provinsi DI Yogyakarta.⁶Salah satu BPR Syariah yang pada tiap tahunnya mengalami pertumbuhan aset yaitu BPRS Bangun Drajad Warga yang berada di Provinsi DI Yogyakarta. Dalam perkembangannya BPRS Bangun Drajad Warga pada tahun 2013 sudah mempunyai aset 33, 5 M, dan dalam rencana pertumbuhan pada tahun 2013 ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 30% dan memperbanyak

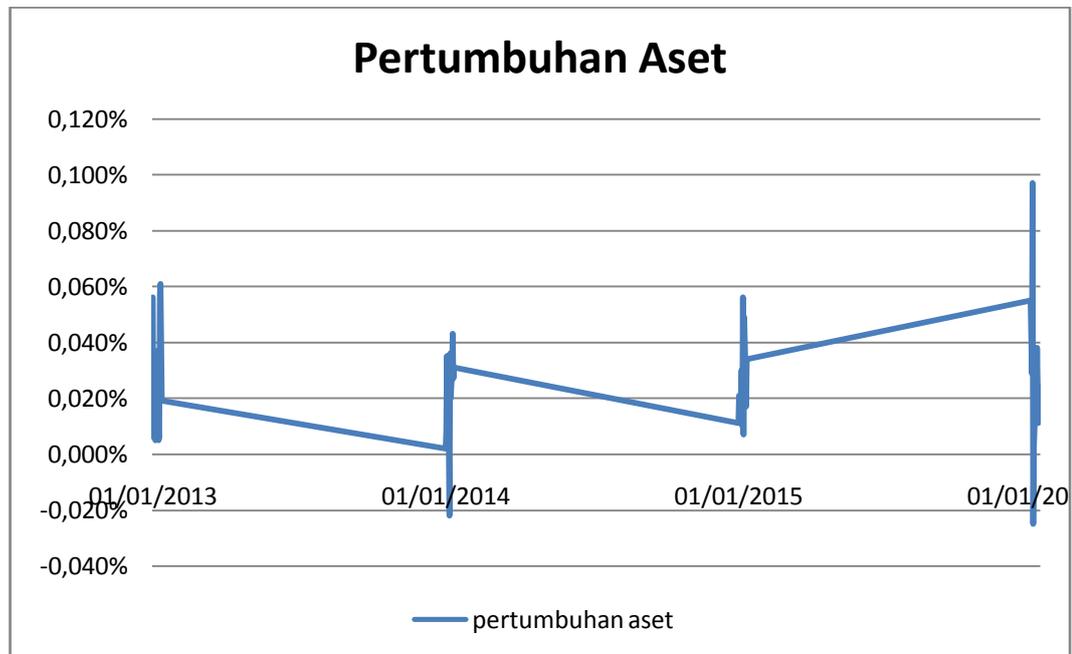
⁴Huda, Nurul & Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Hal. 37

⁵Muhamad, Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, Hal. 19

⁶www.ojk.go.id

jumlah kantor yang ditargetkan memiliki 1 kantor cabang dan 2 kantor kas.⁷

Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan grafik dibawah ini.



Grafik 1.1 Pertumbuhan Aset BPRS Bangun Drajat Warga

Dari grafik diatas dapat diketahui pada tiap tahunnya di BPRS Bangun Drajat Warga asetnya mengalami pertumbuhan. Hal ini tidak lepas dari peran produk-produk yang dimiliki oleh BPRS Bangun Drajat Warga untuk menarik minat nasabah maupun calon nasabah.

BPRS Bangun Drajat Warga mempunyai produk yang diyakini mampu berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. BPRS Bangun Drajat Warga memiliki produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang mampu

⁷ <http://www.bprs-bdw.co.id/category/news/page/2/>. Di akses pada kamis, 21 september 2017 pukul 21.55 wib

menarik minat nasabah untuk menjadi mitra dalam pelaksanaannya. Pada penghimpunan dana sendiri BPRS Bangun Drajat Warga menawarkan beberapa produk antara lain Tabungan IB Wadiah dan Tabungan Mudharabah, Sedangkan pada penyaluran dana yang ditawarkan adalah berupa pembiayaan IB Jual Beli, pembiayaan IB BDW Multi Jasa, pembiayaan IB BDW Sewa, pembiayaan IB BDW Modal Kerja, pembiayaan IB BDW Modal Kerja Bersama, pembiayaan IB BDW Kebajikan. Dari setiap produk yang disebutkan tersebut memiliki berbagai keunggulan masing-masing, dari produk-produk tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah untuk menjadi mitra bagi BPRS Bangun Drajat Warga.

Produk-produk yang ditawarkan diatas telah memberikan kontribusi terhadap BPRS Bangun Drajat Warga untuk melakukan suatu pertumbuhan aset yang dimana aset tersebut memberikan suatu keyakinan bagi nasabah lama maupun nasabah baru untuk menjadi mitra dalam berkembangnya BPRS Bangun Drajat Warga.

Salah satu produk yang menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan aset pada BPRS Bangun Drajat Warga adalah produk pembiayaan modal kerja. Dimana semakin banyak nasabah melakukan pembiayaan modal kerja maka perputaran uang yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga semakin lancar, jika perputaran uang lancar maka pendapatan bank juga meningkat dan hal ini akan membuat pertumbuhan aset pada BPRS Bangun Drajat Warga semakin meningkat tiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesi Oktriani (2012), Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A (2014) dan Aulia Fuad Rahman, Ridha Rochmanika (2011) bahwa pembiayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di suatu perusahaan.

Produk pembiayaan modal kerja yang berada di BPRS Bangun Drajat Warga mempunyai berbagai pilihan akad yaitu akad *musyarakah*, dan akad *mudharabah*, akad tersebut dapat disesuaikan dengan spesifikasi jenis modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah pembiayaan modal kerja yang berada di BPRS Bangun Drajat Warga. Mengingat pentingnya produk pembiayaan modal kerja yang berada di BPRS Bangun Drajat Warga guna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan modal kerja dalam membantu pertumbuhan aset tiap tahunnya, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN ASET”. (Studi Kasus pada BPRS Bangun Drajat Warga di Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti akan membahas pengaruh aset di BPRS Bangun Drajat Warga, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* modal kerja terhadap pertumbuhan aset?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* modal kerja terhadap pertumbuhan aset?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pertumbuhan aset di BPRS Bangun Drajat Warga?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* modal kerja terhadap pertumbuhan aset.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* modal kerja terhadap pertumbuhan aset.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pertumbuhan aset di BPRS Bangun Drajat Warga.

D. Manfaat

1. Bagi penulis:

Supaya memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi penulis sebagai jurusan perbankan syariah terutama pada bidang pembiayaan modal kerja.
2. Bagi pihak akademis:
 - a). Supaya menjadi tambahan ilmu sekaligus wawasan pengetahuan dalam mengenai pembiayaan modal kerja.
 - b). Supaya menjadi tambahan informasi dan wawasan bagi kalangan mahasiswa dan kalangan lainnya.

3. Bagi pihak bank:

Dapat memberikan masukan terhadap pihak bank supaya bisa evaluasi untuk kemajuan kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

4. Bagi masyarakat:

Agar mengetahui sejauh mana peranan produk pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja agar dapat membantu dalam meningkatkan usahanya.